



Rilis Pers:

Deretan Pembunuhan terhadap Perempuan, Jakarta Feminist Serukan Respon Serius Pemerintah

Jakarta, 8 Mei 2024

Dalam seminggu terakhir telah terjadi setidaknya lima kasus pembunuhan terhadap perempuan yang masuk dalam kategori femisida, yakni pembunuhan terhadap perempuan yang didasarkan pada bias gender, ketidaksetaraan gender, penaklukan, opresi, dan kekerasan sistematis terhadap korban perempuan. Dari kelima kasus tersebut semuanya dilakukan oleh laki-laki dan tiga di antaranya merupakan pasangan intim korban. Deretan kasus ini menambah panjang jumlah kekerasan terhadap perempuan dalam bentuknya yang paling kejam. Tidak hanya itu, dari hasil visum diketahui korban mengalami penyiksaan termasuk dengan benda tajam dan kekerasan seksual. Pun ketika sudah tidak bernyawa, pelaku masih melakukan penyiksaan dengan memasukkan tubuh korban ke dalam koper atau memutilasi korban.

Jakarta Feminist menyatakan duka mendalam terhadap korban dan menyesali kejadian beruntun ini yang terjadi di Bekasi, Ciamis, Bali, dan Karimun Jawa. Manajer Advokasi Jakarta Feminist, Naila Rizqi, mengungkapkan bahwa tingginya kasus femisida merupakan puncak dari kekerasan dan seksisme terhadap perempuan yang sudah mengakar.

“Ada persepsi dan budaya yang keliru dalam melihat perempuan, seakan-akan perempuan hanya properti laki-laki dan objek seksual semata. Ini bisa kita lihat dari kelima kasus femisida yang terjadi beberapa waktu terakhir. Ada 2 kasus KDRT dan 3 kasus yang terdapat kekerasan seksual di dalamnya. Trend ini jamak terjadi, data laporan femisida Jakarta Feminist juga menunjukkan tingginya angka femisida yang dilakukan oleh pasangan intim seperti suami, pacar, dan klien.”, ungkap Naila Rizqi.

Laporan Jakarta Feminist tahun 2023, menemukan 184 kasus femisida dengan 194 korban perempuan. Dari total tersebut, 88% pelaku adalah laki-laki dan mayoritas merupakan pasangan intim korban. Dari laporan tersebut juga ditemukan bahwa mayoritas kasus pembunuhan perempuan banyak diawali dengan rangkaian keberulangan kekerasan yang seharusnya dapat dihentikan jika sistem sosial dan hukum berpihak pada perempuan, khususnya korban.

“Femisida ini tidak terjadi begitu saja, biasanya memang diawali dengan kekerasan apalagi dalam konteks relasi intim, ada KDRT yang berulang sebelumnya yang semestinya bisa dicegah baik oleh keluarga, tetangga, bahkan aparat penegak hukum. Ada anggapan kalau KDRT itu urusan privat, jadi kita boleh ikut-ikutan. Nah, ini asumsi yang berbahaya karena jadinya membiarkan korban terus mengalami kekerasan. Seperti kasus korban femisida di Bekasi tahun lalu, korban sudah lapor polisi tapi malah disuruh berdamai.” Imbuh Naila merujuk pada kasus pembunuhan perempuan korban KDRT di Bekasi. Dalam kasus ini aparat penegak hukum memiliki peran yang penting dalam mencegah eskalasi KDRT menjadi femisida apalagi korban telah melakukan pelaporan. Pada kasus pembunuhan dan mutilasi di Ciamis, tetangga korban menyaksikan adanya pertengkaran hingga kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban tapi tidak berani melakukan intervensi.

Jakarta Feminist juga menyayangkan minimnya akses layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan yang berkontribusi pada meningkatnya skala kekerasan pada titik yang ekstrim

seperti femisida. Survey Jakarta Feminist pada tahun 2021 menunjukkan hanya 48% responden survey yang mengetahui adanya lembaga layanan di daerah mereka. Angka ini menunjukkan kurangnya akses informasi publik terhadap lembaga layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan seksual. Hal ini juga yang mendasari Jakarta Feminist untuk menyusun direktori lembaga layanan bagi korban KBGs melalui carilayanan.com.

Selama tiga tahun terakhir Jakarta Feminist telah mendokumentasikan kasus-kasus femisida di Indonesia. Dari pendokumentasian tersebut, kami melihat minimnya keseriusan pemerintah dalam merespon kasus femisida. Masih banyak kasus kekerasan seksual dan KDRT yang berakhir damai, dan banyak korban yang tidak dapat mengakses layanan untuk pemulihan. Jika terus dibiarkan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat berakhir dengan femisida. Oleh karena itu, melalui rilis pers ini Jakarta Feminist mendorong:

1. Pemerintah untuk menyusun, melaksanakan, dan memantau strategi jangka menengah dan panjang terkait pencegahan dan penanganan femisida di Indonesia termasuk upaya pemulihan bagi keluarga korban;
2. Pemerintah untuk memperkuat sistem hotline telepon bagi korban KBGs yang responsif;
3. Pemerintah untuk menyediakan akses informasi dan sistem rujukan lembaga layanan bagi korban KBGs;
4. Kepolisian untuk memberikan pelatihan dan pendidikan terkait KBGs bagi anggotanya serta tidak mengedepankan upaya *restorative justice* pada perkara kekerasan seksual dan KDRT;
5. Institusi penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung untuk mengolah data kasus pembunuhan berdasarkan gender.

**Jika Anda mengalami kekerasan berbasis gender dan seksual atau mengetahui seseorang yang mengalaminya, Anda dapat mencari informasi bantuan bagi korban melalui carilayanan.com.*

Tentang Jakarta Feminist:

Perkumpulan Lintas Jakarta Feminist (Jakarta Feminist) organisasi feminis berbasis di Jabodetabek yang bertujuan mempromosikan nilai-nilai feminis agar mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Jakarta Feminist merupakan inisiator Women's March Jakarta, pengurus Feminist Fest, dan pencipta Cari.Layanan, sebuah direktori lembaga layanan untuk korban-penyintas kekerasan berbasis gender.

Narahubung:

Naila Rizqi
Advocacy Manager Jakarta Feminist
+62 878 5639 7769